

DAMPAK UTANG LUAR NEGERI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Hairunnisa

STIT Al-Qur'an Al-Ittifaqiah (STITQI) Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan

e-mail : Hairunnisazulkarnain@gmail.com

Abstrack

Economic development is a process that must be carried out by the state to increase the welfare of the entire nation. Without the support of productive economic resources, economic development cannot be carried out properly. Therefore, the government carried out a series of policies, one of which was implementing a foreign debt policy. The decline in government External Debt was influenced by global sentiment as a result of the widespread COVID-19 pandemic, which prompted capital outflows from the domestic Government Securities (SBN) market. Government External Debt is managed to support government spending in priority sectors in an effort to encourage economic growth and increase public welfare. The government's external debt aims to support economic development and growth, which has a positive impact in the form of overcoming an increase in production (GDP), expanding employment opportunities and improving the balance of payments. However, the negative impact if the debt is not used improperly, it will threaten the macroeconomic stability of the country. The view of the Islamic economist group that rejects this budget deficit assumes that interest regardless of any motive, production, consumption and however large / high / multiplied / or low, is still seen as usury. Meanwhile, according to the second view, regarding foreign debt, the deficit budget can be used in an Islamic country with several conditions.

Keyword: *Indonesia's External Debt, Economic Growth, Budget deficits*

Abstrak

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang harus dilakukan oleh negara untuk menaikkan kesejahteraan seluruh bangsa. Tanpa adanya dukungan dari sumberdaya ekonomi yang produktif, maka pembangunan ekonomi tidak dapat terlaksana dengan baik. Maka itu, pemerintah melakukan serangkaian kebijakan yang salah satunya adalah menerapkan kebijakan utang luar negeri. Terjadi penurunan Utang Luar Negeri pemerintah tersebut dipengaruhi sentimen global sebagai dampak pandemi COVID-19 yang meluas sehingga mendorong arus modal keluar dari pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik. Utang Luar Negeri Pemerintah dikelola untuk mendukung belanja pemerintah pada sektor prioritas dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Utang Luar Negeri pemerintah memiliki tujuan sebagai penunjang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, yang memiliki dampak positif berupa penanggulangan peningkatan produksi (PDB), memperluas kesempatan kerja dan memperbaiki neraca pembayaran. Akan tetapi dampak negatifnya apabila Utang tidak dipergunakan secara tidak wajar maka akan mengancam kestabilan makroekonomi negara. Pandangan kelompok ekonom islam yang menolak defisit anggaran ini beranggapan bahwa bunga terlepas dari apapun motif, produksi, konsumsi dan berapapun besar-tinggi/berlipat-lipa/atau rendah, tetap dipandang sebagai riba. Sedangkan menurut pandangan kedua, mengenai utang luar negeri, bahwa anggaran defisit dapat digunakan dalam suatu negara islam dengan beberapa syarat

Kata Kunci: Utang Luar Negeri Indonesia, Pertumbuhan Ekonomi, Anggaran defisit

PENDAHULUAN

Dilakukannya pembangunan ekonomi oleh suatu negara agar terjadi peningkatan pendapatan nasional yang berlangsung dalam jangka panjang. Oleh sebab itu, pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang harus dilakukan oleh negara untuk menaikkan kesejahteraan seluruh bangsa. Tanpa adanya dukungan dari sumberdaya ekonomi yang produktif, maka pembangunan ekonomi tidak dapat terlaksana dengan baik. Sementara disisi lain, Indonesia memiliki kendala dalam upaya mewujudkan program-program pembangunan ekonomi.

Pemerintah menghadapi masalah keterbatasan modal untuk pembiayaan pembangunan. Sehingga pemerintah harus mendatangkan sumberdaya ekonomi dari negara lain untuk dapat memberikan dukungan yang cukup bagi pelaksanaan program pembangunan ekonomi nasional. Pemerintah melakukan serangkaian kebijakan yang salah satunya adalah menerapkan kebijakan utang luar negeri.

Utang luar negeri pemerintah Indonesia merupakan utang yang dimiliki oleh pemerintah pusat, terdiri dari utang bilateral, multilateral, komersial, supplier dan Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan di luar negeri dan dalam negeri yang dimiliki oleh bukan penduduk.

Menurut Hardjanto (2015), utang luar negeri sudah dimulai dari zaman pemerintahan Soekarno. Sebab negara masih belum stabil, peningkatan infrastruktur dan kebutuhan alat-alat militer. Di zaman pemerintahan ini, hutang tidak digunakan untuk hal yang menghasilkan produk yang dapat digunakan untuk membayar hutang yang sudah jatuh tempo. Sementara hingga saat ini utang luar negeri Indonesia mencapai 407,526 Milliar USD. Terdapat dalam tabel dibawah ini:

1. Tabel Posisi Utang Luar Negeri Menurut Kelompok Peminjam

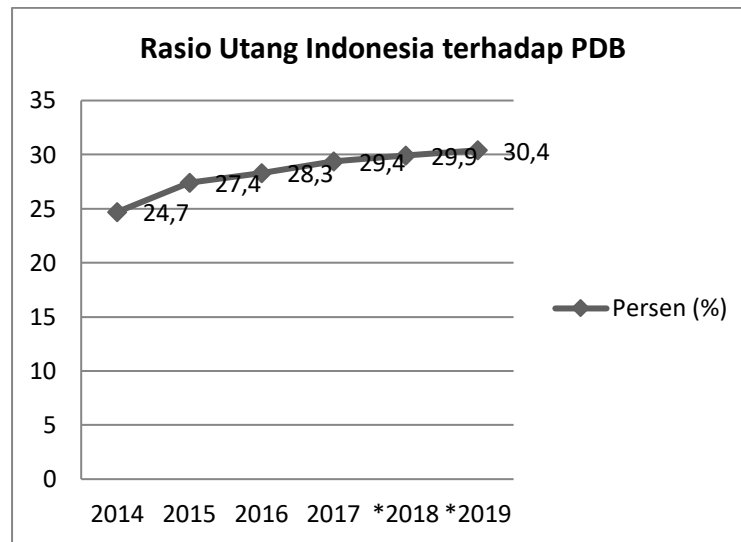
	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
1.Pemerintah dan Bank Sentral	197,138	201,95 1	201,35 6	202,872	207,76 4	203,32 8
1.1 Pemerintah	194,355	199,16 7	198,63 3	199,876	204,94 5	200,61 1
1.2 Bank Sentral	2,783	2,784	2,723	2,996	2,819	2,717

Sumber: Statistik Bank Indonesia

Berdasarkan keterangan data statistik Bank Indonesia, Utang Luar Negeri Indonesia mengalami pertumbuhan lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Pada akhir februari 2020 Utang Luar Negeri Indonesia 407,5 miliar dolar AS, terjadi perlambatan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 7,6%.

Sementara posisi Utang Luar Negeri Indonesia Pemerintah pada akhir Februari 2020 sebesar 200,6 miliar dolar AS atau tumbuh 5,1% (yoy), lebih rendah dari pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 9,5% (yoy). Penurunan Utang Luar Negeri pemerintah tersebut dipengaruhi sentimen global sebagai dampak pandemi COVID-19 yang meluas sehingga mendorong arus modal keluar dari pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik. Utang Luar Negeri Pemerintah dikelola untuk mendukung belanja pemerintah pada sektor prioritas dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sektor prioritas tersebut meliputi sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (23,4% dari total Utang Luar Negeri Pemerintah), sektor jasa pendidikan (16,3%), sektor konstruksi (16,2%), sektor jasa keuangan dan asuransi (12,8%), dan sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (11,6%).

Utang Indonesia yang mengalami kenaikan disertai dengan kenaikan pula pada rasio utang indonesia terhadap PDB. Sebagaimana rasio tersebut dapat dilihat dari grafik dibawah ini:



1. Grafik Rasio Utang Indonesia terhadap PDB

Sumber: www.kemenkeu.go.id

Dapat diasumsikan bahwa Utang Indonesia tidaklah produktif untuk menambah pertumbuhan ekonomi, karena semakin banyak menarik Utang Negara malah menambah rasio utang terhadap PDB. Meskipun begitu rasio yang mengalami kenaikan masih dalam batas aman, dari batas maksimal rasio berdasarkan Undang-undang keuangan negara yaitu sebesar 60%, masih separuh bagian untuk mendekati angka tersebut. Akan tetapi, bila rasio Utang Indonesia terhadap PDB terus bertambah pada akhirnya akan dapat menyentuh ambang batas. Begitu pula dalam APBN mengalami peningkatan karena porsi pembayaran bunga utang, disebabkan menambal utang lama kemudian menerbitkan utang baru.

Komposisi Utang Luar Negeri Indonesia lebih dominan kepada instrumen Surat Berharga Negara (SBN). Lebih dari 60% komposisi SBN sebagai Utang Indonesia memiliki risiko yang sangat rentan terhadap gejolak ekonomi global.

Ekonomi modern saat ini mengalami krisis, oleh sebab itu kurang mampu merealisasikan bagian humanitariannya berupa keadilan dan kesejahteraan umum. Permasalahannya diduga bahwa

ekonomi konvensional mengabaikan nilai sosial dan etika. Dalam jangka panjang, hutang menunjukkan efektif fungsi hutang, disebabkan akan terjadi saving investment gap. Sehingga untuk menghindarinya dilakukan hutang jangka pendek yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW yang melunasi hutang sebelum satu tahun setelah perang Hunain, ketika penaklukan kota Mekah (Muhajirin, 2017)².

Utang Luar Negeri Indonesia apabila dilihat dari segi ekonomi Islam digolongkan sebagai utang yang mengandung Riba Nasi'ah. Dalam posisi ini Utang luar Negeri Indonesia disebabkan oleh beban bunga yang terjadi dikarenakan beban bunga atas penangguhan waktu juga berbentuk mata uang asing. Riba Nasi'ah merupakan riba dalam transaksi utang piutang yang di dalamnya disyaratkan adanya penambahan yang diambil oleh pihak yang memberikan pinjaman dalam bentuk uang diiringi penambahan waktu (Afriyenis, 2016).

PEMBAHASAN

Konsep dan Perkembangan Utang Luar Negeri

Utang pemerintah berupa pinjaman yang dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Utang pemerintah muncul akibat sistem budget deficit, yaitu anggaran yang terjadi disebabkan pengeluaran negara lebih besar daripada penerimaan negara atau disebut defisit, lalu kemudian mengatasi defisit tersebut akhirnya negara memutuskan untuk melakukan pinjaman. Berdasarkan teori Ricardian oleh Barro dalam Fadhillah (2018), bahwa untuk membiayai defisit anggaran belanja pemerintah dengan mengambil kebijakan utang luar negeri, tidak akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Alasannya karena pembiayaan utang untuk pertumbuhan pengeluaran pemerintah pada masa depan akan mengalami kenaikan pajak ketika membayar utang.

Menurut Atmadja, sebelum masa krisis moneter yang terjadi pada kawasan Asia Tenggara, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup tinggi, yang telah dicanangkan oleh pemerintah waktu itu dengan target prioritas terhadap pembangunan ekonomi nasional. Tahun 1970-an pertumbuhan

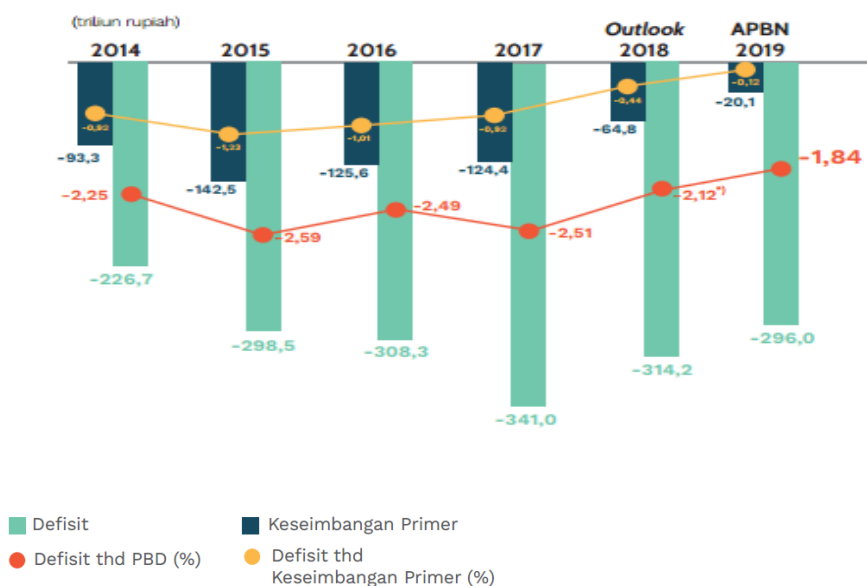
ekonomi Indonesia selalu positif, akan tetapi tidak dibarengi dengan tingkat pendapatan per kapita yang cenderung relatif rendah, sehingga tidak memiliki modal sendiri yang kemudian pemerintah pada masa itu menggunakan bantuan modal asing. Dengan demikian hal tersebut membuat utang Indonesia tidak berkurang meskipun terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi.

Pada masa orde baru (orba) pemerintah menjalankan APBN defisit dengan pinjaman luar negeri yang dimasa itu disebut bantuan luar negeri. Pinjaman tersebut dilakukan ketika pemerintah kekurangan modal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Di awal masa orba sektor swasta belum berkembang dengan baik, tabungan masyarakat masih rendah, apalagi sektor pajak tidak dapat diandalkan. Nilai APBN tahun 1989/90 sebesar Rp. 36.574 milyar dengan hutang luar negeri sebesar Rp 11.325 atau sekitar 30 persen dari nilai APBN. Dengan begitu pembangunan ekonomi Indonesia selama orde baru tidak dapat dilepaskan dari hutang luar negeri. Sehingga akan menimbulkan ketergantungan Indonesia terhadap kreditor luar negeri. Prinsip anggaran berimbang tidak dilakukan, yang terjadi pemerintah melakukan defisit anggaran dengan dibiayai hutang. Maka itu munculnya krisis ekonomi pada tahun 1998 yang menghancurkan semua sendi perekonomian negara. Krisis dengan angka pertumbuhan ekonomi minus 13%, banyak perusahaan yang mengalami kebangkrutan, PHK secara masal terjadi dan melambungnya harga kebutuhan hidup. (Hardjanto, 2015).

Kemudian berdasarkan pusat kajian anggaran badan keahlian DPR (2017), bahwa pada tahun 2015 pembiayaan melalui utang cukup tinggi, sedangkan pada tahun 2016 pembiayaan tersebut menaik lagi sebesar 403,01 triliun Rupiah. Keseimbangan primer yang terjadi pada tahun 2015 yaitu minus 142,49 triliun rupiah. Keseimbangan primer adalah selisih penerimaan Negara dengan belanja Negara, diluar dari pembayaran bunga utang, sehingga melihat minus yang begitu besar kondisi ini mencerminkan penerimaan Negara sudah tidak mampu membiayai belanja Negara. Beban cicilan pokok utang beserta bunga yang bertambah besar sejalan dengan jumlah utang luar

negeri pemerintah membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terbebani (Widharman, dkk; 2012).

Pada tahun 2018 pembiayaan anggaran APBN sebesar 314,2 triliun rupiah sementara pembiayaan utangnya 387,4 triliun rupiah, sehingga defisit anggaran tahun 2018 sepenuhnya ditanggung oleh pembiayaan utang. Seperti gambar grafik dibawah ini bahwa setiap keseimbangan primernya selalu diangka minus dan defisit, meskipun angka persentase tiga tahun terakhir tersebut mengalami penurunan :



Sumber: Buku Informasi APBN, 2020

1. Gambar Grafik Rasio APBN terhadap PDB

Menurut Rahardaja dalam Fadhilan dan Sutjipto (2018), defisit anggaran merupakan anggaran yang direncanakan untuk menjadi defisit, sebab budget constant, merupakan pengeluaran pemerintah direncanakan lebih besar dari penerimaan pemerintah ($G > T$) agar terpenuhi tujuan pembangunan negara.

Keputusan BAPPENAS dalam Rencana Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri (Rppln) 2015-2019, bahwa faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan pemanfaatan pinjaman luar negeri

diantaranya: 1. Sebagai bagian dari pengelolaan biaya dan resiko pinjaman pemerintah, 2. Menambah kapasitas implementasi terutama untuk program program di bidang infrastruktur termasuk dengan mendorong peran BUMN dan swasta, 3. Sebagai upaya pengembangan model program/ kegiatan melalui replikasi dari program/ kegiatan pinjaman luar negeri dan 4. Sebagai instrumen kerjasama pembanguna dengan para mitra. Berikut dengan penjelasan mengenai pinjaman luar negeri digunakan dalam bentuk Pinjaman Tunai dan Pinjaman Kegiatan diantaranya;

a. Pinjaman Tunai berupa pinjaman yang pencairannya bersifat tunai, antara lain mencakup pinjaman program, development policy loan, refinancing, stand by loan, program for result, Result Based Lending (RBL), pembiayaan likuiditas jangka pendek, pembiayaan kontijensi, dan pembiayaan untuk permodalan; b. Pinjaman Kegiatan berupa pinjaman proyek, credit line dan lain-lain yang pencairannya terkait dengan kegiatan, antara lain mencakup pinjaman untuk kegiatan kementerian dan lembaga, fasilitas kredit ekspor, dan penerusan perjanjian pinjaman (SLA) kepada pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dampak Utang Luar Negeri Indonesia

Utang Luar Negeri pemerintah memiliki tujuan sebagai penunjang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, yang memiliki dampak positif berupa penanggulangan peningkatan produksi (PDB), memperluas kesempatan kerja dan memperbaiki neraca pembayaran. Akan tetapi dampak negatifnya apabila Utang tidak dipergunakan secara tidak wajar maka akan mengancam kestabilan makroekonomi negara. Disebabkan menjadi beban pemerintah saat melakukan pembayaran utang tersebut, dalam hal ini pembayaran cicilan pokok dan bunga utang luar negeri berpengaruh terhadap perekonomian. (Junaedi, 2018).

Dampak utang apabila dikelola dengan bertanggung jawab maka dapat menutupi kekurangan investasi domestik, dibidang infrastruktur ataupun industri yang dapat memiliki output dengan nilai yang mampu membayar Utang Pemerintah. Kedua, utang dapat menutup defisit neraca

pembayaran. Ketiga, utang dapat mengatasi krisis ekonomi atau krisis finansial, berupa dana talangan, pembelian aset yang bangkrut, suntikan modal dengan tujuan menjaga stabilitas perekonomian negara. Lalu, utang dapat digunakan sebagai program konsumtif dan penanggulangan kemiskinan, terakhir, hutang digunakan untuk proyek non produktif serta proyek mercusuar tanpa control ketat dari masyarakat/DPR. Dampak-dampak tersebut terjadi apabila utang dikelola dengan benar, namun apabila utang dimanfaatkan untuk kepentingan sekelompok elite maka dampaknya akan menjadi beban berat untuk generasi di masa depan yang menanggung pembayaran utang tersebut (Rahardjo, 2015).

Menurut Widharma, dkk (2013) Kebijakan pengambilan utang baru agar menutupi utang lama perlu dikaji ulang, karena kebijakan menutup utang luar negeri yang lama dengan mengambil utang baru dapat mengakibatkan pada penambah total utang luar negeri dari tahun ke tahun, Indonesia bisa masuk perangkap utang (debt-trap), kemudian akan berimplikasi beban berat pada APBN dalam jangka panjang. Sehingga kemampuan APBN untuk memberikan stimulus bagi perekonomian disebabkan dana pemerintah dipakai membayar cicilan utang yang besar tiap tahunnya, sedangkan pembayaran cicilan utang tidak dapat memberikan dampak bagi perekonomian dalam negeri.

Utang luar negeri memiliki dampak sekaligus juga hasil dari dampak variabel lain yang mempengaruhinya. Seperti penelitian oleh Saputra, Yogie dan Soelistyo, bahwa adanya pengaruh dari defisit anggaran, candangan devisa, ekspor neto dan utang luar negeri tahun sebelumnya yang menjadi faktor terjadinya utang luar negeri pemerintah. Sementara pemerintah melakukan pinjaman dalam negeri dengan menerbitkan surat utang negara atau obligasi pemerintah untuk menutupi cela defisit negara dalam pembiayaan APBN, akan tetapi hasilnya obligasi masih belum bisa menutupi defisit yang ada.

Terjadi peningkatan utang luar negeri yang artinya pemerintah mengandalkan ekspansi dan pinjaman dalam anggaran, sehingga cara ini akan berpotensi terjadi kelonggaran financial yang tidak dapat dikendalikan sehingga tidak dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Dampaknya terjadi inflasi yang lebih tinggi, depresiasi nilai tukar, defisit neraca pembayaran yang berkesinambungan serta beban cicilan utang yang lebih berat. Sehingga akan menekan sumber-sumber daya untuk pembangunan, memperlambat laju pertumbuhan, memperparah pengangguran dan ketegangan sosial (Chapra dalam Fatturoyhan dan Afif, 2017).

Dampak utang menurut, memiliki dua sudut pandang, yaitu sudut pandangan pertama ekonomi makro dari utang dan yang kedua sudut pandang ekonomi publik. Dalam sudut pandang ekonomi makro dari utang, bahwa memberi dampak terhadap pertumbuhan ekonomi dari negara penerima. Sementara dilihat dari sudut pandang ekonomi publik, negara sedang berkembang memiliki peranan yang besar dalam sektor publik untuk perencanaan proyek pembangunan. Oleh sebab itu pengeluaran publik sebagai suatu mekanisme pembangunan juga mengalami peningkatan. Bertambahnya pengeluaran publik seringkali tidak seimbang dengan penerimaan, kemudian dibutuhkan sumber pembiayaan lain. Atas pertimbangan tersebut, maka dampak utang secara makro menjadi dampak secara fiskal, yang pengaruh utang secara fiskal dilihat dari dampaknya terhadap konsumsi masyarakat, tingkat investasi, pengeluaran pemerintah dan pendapatan pajak.

Utang luar negeri dipercaya memiliki dampak positif terhadap pembangunan Ekonomi Indonesia. Utang luar negeri dapat meningkatkan persediaan tabungan, kemudian untuk mencukupi proses pembangunan yang berkinambungan, hingga pada akhirnya diharapkan agar kebutuhan terhadap utang akan menurun dengan sendirinya.

Utang Luar Negeri Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Syariah

Dalam bahasa arab utang adalah *ad Dayn* merupakan sesuatu yang berada dalam tanggung jawab orang lain, disebut juga dengan wasfu al-dzimmah (sesuatu yang mesti dilunasi), dengan kata lain utang negara adalah utang rakyat yang diperlukan untuk rakyat. (Aziz dan Ramdansyah dalam Lutfi, 2018). Keuangan negara Indonesia menganut sistem *budget deficit*, dimana anggaran kebutuhan lebih besar dibandingkan penerimaan negara. Berbeda dengan sistem pemerintah islam di masa awal. Ketika masa pemerintahan Rasulullah dan Khulafaurrasyidin, jarang sekali terjadi *budget deficit*, karena para pemimpin memiliki prinsip bahwa pengeluaran berdasarkan pemasukan negara. Pernah terjadi *budget deficit* akibat perang Hunain, sebelum *Fathu Makkah* disebabkan banyak yang masuk islam maka pengeluaran zakat lebih besar dari penerimaan zakat tersebut, akan tetapi hutang tersebut dilunasi setahun kemudian setelah perang (Huda dalam Lutfi, 2018).

Perbedaan pandangan diantara kalangan Ahli ekonomi islam mengenai dua konsep anggaran yaitu, apakah melakukan penerapan konsep pembiayaan defisit atukah mempertahankan konsep anggaran berimbang, pada negara Islam atau Negara yang mayoritas muslim. Pandangan dari kelompok yang memiliki pendapat mengenai negara Islam tidak semestinya melakukan pembiayaan defisit, disebabkan apabila dilakukan maka pada akhirnya pemerintah berutang dengan konsekuensi beban bunga yang berarti adanya riba dan menimbulkan pemborosan dari pengeluaran yang bertambah.

Pandangan kelompok ekonom islam yang menolak defisit anggaran ini beranggapan bahwa bunga terlepas dari apapun motif, produksi, konsumsi dan berapapun besar-tinggi/berlipat-lipa/atau rendah, tetap dipandang sebagai riba. Kemudian utang luar negeri dapat menjatuhkan martabat bangsa, sementara Islam mengajarkan agar dapat menjaga integritas baik secara individu maupun bangsa. Terlihat bahwa Indonesia telah di dikte dan kehilangan kebebasan dalam mengatur kebijakan ekonominya ketika berhadapan dengan IMF. Lalu utang luar negeri melanggar prinsip *fair dealing* dalam Islam, tidak ada proses tawar menawar yang adil dalam pemberitaan utang,

shingga terjadi bias antara keuntungan negara maju dan kerugian bagi negara penerima. Persyaratan yang harus dipenuhi dari keputusan negara donor yang cenderung lebih menguntungkan mereka. Kelemahan negara debitur sering dimanfaatkan oleh negara donor untuk kepentingan politik dan ekonomi.

Akan tetapi, dari sisi pandangan kelompok ekonom islam mengenai tidak perlunya mempertahankan konsep anggaran berimbang, karena konsep anggaran berimbang memiliki kosenkuensi terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi serta tidak tergalinya sumber daya alam akibat terbatasnya modal. Maka ekonom dengan memiliki pandangan ini berarti setuju dengan konsep anggaran defisit. Diantara ekonom islam yang menyetujui konsep anggaran defisit adalah Mannan, Umar Chapra dan Abdul Qodim Zallum.

Pendapatnya Manna bahwa sebuah negara Islam modern semestinya dapat menerapkan konsep anggaran modern (anggaran defisit), yang dalam hal ini memerlukan tambahan dengan cara meminjam. Namun, utang dibuat dengan tanpa adanya tekanan dari pihak pemberi utang, yang berupa hilang kebebasan, kehormatan dan kedaulatan negara muslim itu sendiri. Kemudian utang tersebut tidak menggunakan bunga.

Sementara menurut Umar Chapra anggaran defisit dapat diterapkan dengan solusi lain dari Manna, yaitu bahwa negara-negara Muslim harus menutup defisit anggaran dengan pajak, yaitu mereformasi dengan sistem perpajakan dan program negara bukan dengan jalan ekspansi moneter dan meminjam. Chapra lebih setuju meningkatkan pajak dibanding mengambil pinjaman karena akan membawa riba selain itu juga akan membebani generasi yang akan datang. Selain itu Abdul Qadim juga menyetujui bahwa anggaran defisit dapat diterapkan dalam negara islam, dengan solusi yang juga sama dengan Umar Chapra, yaitu defisit yang terjadi diatasi dengan pemberdayaan BUMN dan perpajakan. Abdul Qadim mengatakan bahwa anggaran negara memiliki beban berat dan besar, sehingga pendapatan baitulmal dari sumber-sumber tradisional seperti Ghanimah, Fay'i,

jizyah, Kharaj, 'Usy,r dan Khumus, menurutnya terkadang belum bisa memadai dalam pengeluaran negara yang berkembang. Menurut Zallum, utang luar negeri dan lembaga keuangan internasional, tidak diperbolehkan oleh hukum syara', sebab utang luar negeri tidak terlepas dari unsur riba yang tentu diharamkan dan persyaratan tertentu dari negara atau lembaga internasional pendonor akan berkuasa atas kaum muslimin.

Dilema pemerintah Indonesia mengadakan kerjasama luar negeri dalam bentuk utang luar negeri, ialah agar dapat memenuhi keterbatasan kas negara, yang sampai saat ini digunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan pembangunan ekonomi Indonesia. Menggunakan sistem ekonomi konvensional, utang luar negeri memiliki bermacam masalah, sehingga pemerintah memerlukan jalan lain yaitu dengan sistem ekonomi islam agar Indonesia dapat terlepas dari jeratan beban utang. Dalam merupakan perbuatan yang diperbolehkan dalam islam, akan tetapi kemampuan dalam pembayaran juga harus menjadi pertimbangan pemerintahan Indonesia karena Indonesia memiliki utang di masa-masa sebelumnya yang belum terbayarkan. Dalam Al-qur'an dijelaskan bahwa yang mengalami kesulitan atau kesukaran dalam mengembalukan utang, maka dianjurkan untuk memberikan tempo atau waktu sampai peminjam mampu melunasinya. Sehingga utang luar negeri ini bersifat Riba' Nasi'ah atau disebut Riba Duyun, yang artinya riba' yang timbul akibat utang piutang yang tidak memenuhi kriteria untung disertai dengan resiko (al ghunmu bil ghurni) dan hasil usaha muncuk bersama biaya (al kharaj bi dhaman). Dimaksud riba' tersebut adalah adanya transaksi didalamnya mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban, hanya karena berjalan waktu. Sementara Nasi'ah ialah penanguhan dari penerimaan jenis barang ribawi yang ditukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Sehingga riba nasi'ah terjadi karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara barang yang diserahkan hari ini dengan barang yang diserahkan kemudian (Afriyenis, 2016).

Saat ini alternatif sumber pembiayaan pembangunan dalam ekonomi islam dapat diperoleh dalam negeri maupun luar negeri, berupa diantara instrumen wakaf dan sukuk, sementara dari luar negeri berupa kerjasama dengan akad-akad yang sesuai syariah. Sukuk negara saat ini telah berkembang di Indonesia, hal ini dapat menjadi potensi bagus untuk menjadikan sumber pembiayaan pembangunan negara. Selain itu juga pinjaman luar negeri pemerintah dapat dilakukan tanpa ada unsur riba dengan sistem kerjasama sesuai syaria, yang saat ini sudah dikembangkan oleh lembaga internasional yang salah satunya Islamic Development Bank, yaitu seperti mudharabah (profit-loss sharing), musyarakah (partnership), murabahah dan sebagainya. Bentuk kerjasama ini bersifat *flow creating equity* dibanding dengan *flow creating* dengan *flow debt*. Selain itu penyertaan modal lebih konstruktif, proporsional, dan adil dalam kerjasama karena terdapat pembagian keuntungan dan risiko (*profit-Loss Sharing*).

PENUTUP

Kesimpulan

Utang luar negeri Indonesia bermula dari anggaran negara yang defisit. Anggaran defisit disebabkan pengeluaran lebih besar dari pemasukan yang ada. Sehingga anggaran yang tidak bisa dipenuhi oleh pemerintah harus mengambil kebijakan untuk melakukan pinjaman, disebabkan menaikkan intesif pajak masih belum mencukupi kebutuhan anggaran.

Utang luar negeri yang terbanyak adalah melalui Surat Berharga Negara. Memiliki resiko bunga yang tinggi dengan jangka waktu pendek, sehingga semakin bertambah dari tahun ke tahun yang akan mengerogoti APBN Indonesia. Akan tetapi apabila keputusan tidak menarik pinjaman maka pembangunan Indonesia terhenti yang akan berdampak pada pertumbuhan perekonomian Indonesia.

Bila ditinjau dari perspektif Islam, utang luar negeri mengandung transaksi Riba', yaitu Riba' Nasi'ah. Sehingga para ekonom islam memiliki 2 pandangan dalam menanggapi utang luar negeri Indonesia. Pertama, Indonesia seharusnya menggunakan anggaran berimbang bukan anggaran defisit, sehingga anggaran yang dikeluarkan hanya sesuai dengan kas dan tabungan pemerintahan. Karena bagaimana pun bentuknya utang luar negeri tetap menyentuh riba', sementara riba' itu haram.

Sedangkan menurut pandangan kedua, mengenai utang luar negeri, bahwa anggaran defisit dapat digunakan dalam suatu negara islam dengan beberapa syarat, diantaranya, yaitu: pertama, meminjam dari negera-negara asing maupun keungan internasional islam. Kedua, penguasaan (pemagaran oleh negara) atas sebagian harta milik umum baik berupa minyak bumi, gas alam maupun maupun barang tambang. Ketiga, menetapkan pajak (dharibah) kepada umat.

Daftar Pustaka

- Afriyenis, “*Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Utang Luar Negeri Pemerintah Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia*” dalam Maqdis (*Jurnal Kajian Ekonomi Islam*)-Volume 1, No.1, Januari-Juni 2016.
- Fadillah dan Sutjipto, “*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Utang Luar Negeri Indonesia*”, dalam // <http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/Ekonomi-Qu> Vol. 8, No. 2 Okt 2018 p-ISSN: 2089-4473 e-ISSN: 2541-1314
- Fatturoyhan, “*Pembiayaan Defisit APBN Menurut Umer Chapra (Studi Analisa Kritik Terhadap Pembiayaan Defisit APBN Indonesia Periode 2010-2015)*” dalam CAKRAWALA: Jurnal Studi Islam, Vol. XII, No. 1, 2017
- Harjanto, “*Hutang Luar Negeri Indonesia Antara Kebutuhan Dan Beban Rakyat*”, dalam Jurnal Ekonomi ISSN: 2302-7169, Vol. 4, No.8, Januari-Juni 2015. Cirebon: Universitas 17 Agustus 1945, h. 22.
- Muhajirin, “*Konsep Hutang Negara Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam*” dalam Al-Mashlahah (Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam) Vol 3, No 06 (2015).
- Muhaimin, “*Masalah Hutang Luar Negeri Indonesia Dan Alternatif Solusinya Dalam Perspektif Kebijakan Ekonomi Makro Islam*” dalam <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/taradhi/article/view/225> Jurnal Studi Ekonomi: At-Tar Adhi Vol 5, No 2 (2014)
- Junaedi, “*Hubungan antara Utang Luar Negeri dengan Perekonomian dan Kemiskinan: Komparasi Antarrezim Pemerintahan*”, dalam // www.jurnal.bppk.kemenkeu.go.id. Posted 11 September 2018 dan diakses April 2020.
- Kurnia, “*Pengaruh Utang Luar Negeri Dan Penanaman Modal Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi*” dalam Jurnal Akuntansi. Vol. 3 No. 2. Januari 2017 p-ISSN 2339-2436 e-ISSN 2549-5968
- Rusydi, “*Analisis Dampak Utang Luar Negeri terhadap Kinerja Fiskal Pemerintah*” dalam <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/ecc/article/view/1185>
- Saputro; Yogie Dahilly dan Soelistyo, “*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Utang Luar Negeri Di Indonesia*”, dalam <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jie/article/view/5408>
- Widharma, Budhi, dkk., “*Utang Luar Negeri Pemerintah Indonesia: Kajian Terhadap Faktor-Faktor Yang Berpengaruh*”, dalam

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/EEB/article/view/3206>>. Date accessed: 30 apr. 2020.

Wulan, “*Utang Negara dalam Perspektif Ekonomi Islam*” dalam <https://www.ibec-febui.com/utang-negara-dalam-perspektif-ekonomi-islam/#top>